

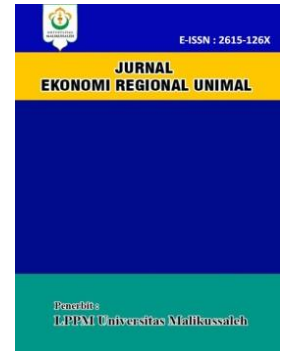
Hubungan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Aceh Tenggara Periode Tahun 2008-2017

Ernita Odilia Siburiana^{a*}, Hijri Juliansyah^{b*}

^a *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh*

a Corresponding author: hijri.juliansyah@gmail.com

* ernitaodilias@gmail.com



ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Keywords:

Regional Own Revenue, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, Sharing Fund, Financing Surplus, Capital Expenditure Budget, Multivariate Vector Autoregression (VAR).

This study aims to analyze the interrelation of local original Revenue, General allocation fund, Specific Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and Financing Surplus toward Capital Expenditure in Southeast Aceh's regency. This research uses secondary data in the year 2008-2017. The research utilizes Multivariate Vector Autoregression (VAR) with Impulse Reseponse Function (IRF) and Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). The result of showed that there was no interrelation (causality) between Local Original Revenue toward Capital Expenditure and both of them were influenced each other. Contribution in each variable to its variable and others variable occurred.

I. PENDAHULUAN

Kondisi belanja modal kabupaten Aceh tenggara dari tahun 2008-2017 berfluktuatif tiap tahunnya cenderung meningkat. Akan tetapi mulai tahun 2012 Belanja modal mengalami penurunan dan pada tahun 2013-2017 terjadi kenaikan yang signifikan sebesar. Hal ini disebabkan oleh belanja modal di daerah yang masih susah untuk dieksekusi meskipun pencairannya dari pemerintah pusat sudah relatif lebih cepat. Selama ini pemerintah daerah justru lebih banyak membuat belanja yang sifatnya birokratis seperti menambah pegawai dan administrasi. Padahal realisasi dari belanja modal sendiri akan punya daya dorong keinvestasi daerah.

Undang-Undang No. 32 Thn 2004 yang berisi tentang pemerintah Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk membenahi dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah pusat kedaerah.

Transferan dari pemerintah pusat yang berbentuk DBH, DAU dan DAK tersebut merupakan sumber utama pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehari-hari dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal

dengan daerah lain dan menyakinkan terlaksananya standar pelayanan publik.

Berikut Data PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA dan Belanja Modal di Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2015-2017.

Tabel 1
Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal Periode 2015-2017 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	PAD	DAU	DAK	DBH	SILPA	BM
2015	59.153	539.24	195.70	17.723	36.452	346.87
2016	61.457	594.67	344.07	16.116	33.464	394.68
2017	60.053	584.22	191.16	15.407	93.711	364.23

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Aceh Tenggara)

Berdasarkan tabel 1 di atas menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran dari tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat jika dilihat dari perkembangan variabel yang diteliti PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA mengalami fluktuatif pada tahun 2015-2017 yang disebabkan oleh bertambahnya atau berkurangnya objek pajak dan retribusi daerah, pembayaran yang bersifat wajib, pembangunan infrastruktur daerah terpencil, tidak meratanya jumlah DBH

yang diterima, berkurangnya hasil SILPA yang diperoleh dalam satu periode akuntansi, dan kurang stabilnya belanja modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan PAD, DAU dan DAK telah diteliti oleh (Pradita, 2012), (Telaah & Akuntansi, 2008) (Kabupaten, Di, & Yogyakarta, n.d.) 2010, (Pelealu et al., 2012). Penelitian yang memberikan fokus PAD, DAU dan DBH terhadap BM telah diteliti oleh (Susanti, Fahlevi, Akuntansi, Ekonomi, & Kuala, 2016), (Novianto & Hanafiah, n.d.), 2015. Selanjutnya penelitian yang memberikan fokus pada DAU, PAD, SiLPA terhadap belanja modal telah diteliti oleh (Hafizh, 2018).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi taksama dimana selain PAD, DAU, DAK juga menjadikan DBH dan SiLPA sebagai variabel independen penelitian ini.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan PAD, DAU, DAK, DBH, Dan SiLPATerhadapBelanja Modal Di Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2008-2017.

Selanjutnya bagian kedua penelitian ini membahas kajian teoritis variabel-variabel terkait, pembatasan teknik analisis dipaparkan dibagian ketiga. Untuk melihat hasil dan pembahasan dituliskan pada bagian keempat dan Akhirnya pada bagian kelima merupakan kesimpulan dan saran.

2. TINJAUAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber penerimaan daerah yang perlu di tingkatkan pertumbuhannya ialah PAD. Dalam otonomi daerah sangat perlu adanya pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat di pemerintah daerah. Dikarenakan pertumbuhan investasi di kab/kota Aceh perlu di utamakan sebab di harapkan member pengaruh positif kepada peningkatan ekonomi di daerah.

Menurut Halim Abdul dalam (Novianto & Hanafiah, n.d.), menjelaskan PAD ialah semua hasil dari daerah yang menjadi sumber perekonomian daerah itu sendiri.

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber PAD terdiri dari:

1. PD (Pajak Daerah),
2. RD (Retribusi Daerah),
3. HPKDYP (Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan),
4. LPADYA (Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah),

Menurut Darise dalam ((Susanti et al., 2016) PAD ialah pendapatan yang diterima daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. PAD sebagai sumber penerimaan ekonomi asli daerah yang perlu dikembangkan agar bisa membiayai belanja daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang selalu meningkat, sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dilaksanakan.

Menurut Sianipar (2011) dalam (Novianto & Hanafiah, n.d.) menjelaskan bahwa PAD memberi dampak positif dan signifikan bagi belanja modal .Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu penentu dalam menentukan alokasi belanja modal. Semakin besar PADA yang diterima sehingga akan meningkatkan alokasi belanja modal daerah itu sendiri.

Dana Alokasi Umum

Dana yang bersumber dari anggaran APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam kegiatan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAK yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil sehingga akan menerima DAU yang relatif besar, dengan melihat kemampuan APBD dalam memdanai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam pembangunan daerah yang dibuktikan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan Belanja pegawai.

Sejak ditetapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat sangat mengiginkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengharapkan DAU. Pada beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena belanja daerah lebih diutamakan oleh jumlah DAU dari pada PAD.

Hubungan positif yang sangat kuat antara DAU dengan belanja modal mengingat bahwa dilakukannya otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang dianggarkan melalui belanja modal. Bahkan Abdullah dalam (Pradita, 2012) menjelaskan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam APBD. Kurangnya kontribusi DAU bagi belanja modal yang belum efektif sehingga masih banyak daerah yang belum merata pembangunannya dan masih kurang

pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum efektif, contohnya fasilitas pendidikan dan kesehatan dan sektor usaha kecil yang terabaikan.

Menurut Kusnandar dalam (Hasil et al., 2014) menyatakan bahwa DAU sangat member pengaruh bagi Belanja Modal. Variabel DAU member pengaruh bagi belanja modal hal ini diakibatkan oleh adanya transfer DAU dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikan pendapatannya untuk mendanai belanja modal.

Menurut Abdullah dan Halim dalam (Telaah & Akuntansi, 2008) berkata bahwa orang akan lebih hemat dalam membelanjakan pendapatan mereka yang merupakan hasil *effort*-nya sendiri dibandingkan pendapatan yang diberikan pihak lain (*grantatautransfer*).

Menurut Sianipar dalam (Novianto & Hanafiah, n.d.) menjelaskan bahwa DAU sangat berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya pertimbangan untuk menentukan besarnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Meningkatnya DAU maka akan semakin meningkat pula belanja modal suatu daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus ialah dana yang direalisasikan dari APBN bagi daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus suatu daerah dan merupakan urusan daerah yang prioritas nasionalnya meliputi: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan jenis investasi, prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam (Telaah & Akuntansi, 2008), wilayah yang menerima Dana Alokasi Khusus harus menyediakan dana penyesuaian paling sedikit 10% dari dan alokasi khusus yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus di anggarkan dalam anggaran daerah (APBD).

Pemanfaatan DAK ditujukan pada investasi pembangunan, pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan jangka waktu yang panjang termasuk pengadaan sarana fisik yang panjang, dengan adanya DAK diharapkan dapat member pengaruh pada belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Ardhani, 2011)

Nuarisa (Jawa, 2014), melakukan penelitian tentang pengaruh PAD, DAU, DAK

terhadap belanja modal, yang kemudian salah satu kesimpulan dari hasil penelitiannya yaitu DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Antara DAK dengan belanja modal memiliki hubungan/keterkaitan yang signifikan berupa semakin tinggi DAK yang diterima suatu daerah maka belanja modal tersebut juga akan semakin meningkat.

Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berupa dana alokasi khusus ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus seperti sarana dan prasarana yang manfaatnya diperoleh dalam jangka panjang dan ini sesuai dengan kriteria belanja modal. Jadi, apabila DAK yang diterima pemerintah daerah itu besar maka belanja modal daerah tersebut juga akan meningkat.

Menurut Legrenzi dalam (Susanti et al., 2016) menunjukkan bahwa dana transfer dalam jangka panjang sangat berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer yang disebabkan oleh penurunan belanja modal.

Menurut Nugroho (Bulukumba, 2015) menunjukkan bahwa adanya DAK diharapkan dapat member pengaruh terhadap belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Dana Bagi Hasil

DBH yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang disalurkan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada daerah terdiri dari 2 jenis yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumberdaya Alam).

Menurut Harahap dalam (Jawa, 2014) menunjukkan bahwa dana bagi hasil yang berasal dari pajak ialah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan (pasal 25,29), wajib pajak orang pribadi dalam negeri (pasal 21). DBH pajak ditetapkan menteri keuangan. DBH pajak sendiri disalurkan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah.

Menurut peraturan perundang-undangan No.55 Tahun 2005 menunjukkan bahwa DBH ialah dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pemerintah daerah akan mampu

menetapkan belanja modal yang semakin tinggi apabila anggaran DBH juga semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan apabila anggaran dana bagi hasil semakin kecil pula.

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dasar hukum dana bagi hasil pajak adalah:

- a. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- b. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- c. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

DBH yang berasal dari pajak yaitu bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan pajak penghasilan pasal 21.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil SDA ialah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi (Jawa, 2014).

Penerimaan iuran tetap (*land-rent*) yaitu semua penerimaan iuran yang diterima oleh negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan. Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) ialah iuran produksi yang dihasilkan Negara sebagai pemegang kuasa dalam pertambangan sehingga menerima hasil yang berupa bahan galian yang di berikan sebagai hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahan galian. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor perikanan terdiri dari: Penerimaan pungutan perusahaan perikanan, Penerimaan pungutan hasil perikanan. Dana bagi hasil perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas yang dibagikan ke daerah ialah penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan dan gas alam dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas), DBH Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi dibagi dengan yang bersangkutan, (Jawa, 2014).

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan (Susanti et al., 2016), menunjukkan bahwa hasil penelitian PAD, DAK, dan DBH secara serentak member pengaruh terhadap Belanja Modal penelitian sebelumnya menggunakan regresi linier berganda penelitian menggunakan lokasi kabupaten/kota di wilayah Aceh.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut PP RI No. 71 Tahun 2010, SiLPA ialah selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/ APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan.

Bentuk penggunaan SiLPA ada dua yaitu :

- a. Kegiatan Lanjutan.
- b. Kegiatan Baru.

SiLPA sebenarnya sebagai indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan, Litbang dalam (Hafizh, 2018).

Selama ini pemda kerap menggunakan SiLPA sebagai pendapatan daerah padahal SiLPA merupakan dana sisa yang hanya boleh digunakan dalam konteks pembiayaan.

Selain itu sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah

pusat dan daerah SiLPA hanya dapat digunakan bila defisit APBN dan APBD mencapai 3 persen (%).

Berdasarkan penelitian Aziz dalam (Hafizh, 2018), menjelaskan tentang sisa lebih pembiayaan anggaran yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja modal. Dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa besarnya SiLPA pada suatu daerah menjadi salah satu faktor dalam menentukan belanja modal pemerintah daerah.

Menurut Ardhini dalam (Hafizh, 2018) menunjukkan bahwa hamper seluruh SiLPA diberikan kepada Belanja Langsung dalam bentuk Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Pegawai secara langsung dapat memberikan kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya dengan APBD SiLPA anggaran tahun pertama merupakan salah satu komponen penerimaan daerah.

Belanja Modal

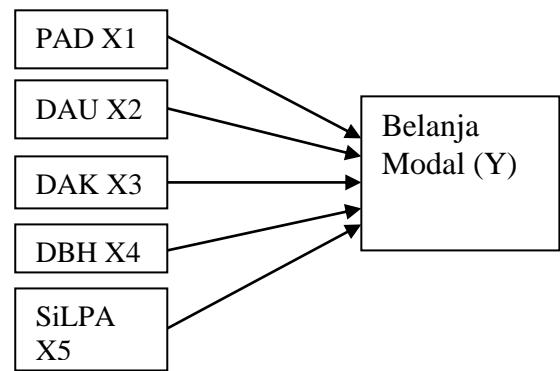
PP RI Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa belanja modal ialah pengeluaran anggaran dalam perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Halim dan Usufi dalam (Susanti et al., 2016) memisahkan BM antara lain, yaitu Belanja Tanah, Belanja modal peralatan atau mesin, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Bangunan atau Gedung, Belanja Modal Fisik lainnya merupakan biaya/pengeluaran yang difungsikan sebagai pengadaan.

Menurut Halim dalam (Dana, Umum, Khusus, & Daerah, 2013) menunjukkan bahwa belanja modal ialah belanja anggaran dalam menghasilkan aset tetap dan aset lainnya yang nilai manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut PMK Nomor 101/PMK 02/ 2011 tentang klasifikasi anggaran. Belanja modal dipakai untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal (jalan, irigasi dan jaringan), belanja modal lainnya, dan belanja modal badan layanan umum (BLU).

Kerangka Konseptual Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Konseptual Pemikiran

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Belanja Modal merupakan variabel terikat (Dependen), sedangkan PAD, DAU, DAK, DBH dan SiLPA merupakan variabel bebas (Independen). Dari gambar diatas penulis ingin menguji apakah PAD, DAU, DAK, DBH Dan SiLPA member pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara parsial. Untuk mengujinya peneliti menggunakan analisis regresi dinamis dengan menggunakan alat Eviews.

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi hipotesis dalam penulisan ini ialahantara lain:

- H₁= Diduga PAD memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap BelanjaModal di Kabupaten Aceh Tenggara.
- H₂= Diduga DAU memiliki hubungan positif dan signifikan terhadapBelanja Modal di Kabupaten AcehTenggara.
- H₃= Diduga DAK memiliki hubungan spositif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten AcehTenggara.
- H₄= Diduga DBH memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Aceh Tenggara.
- H₅= Diduga SiLPA memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Aceh Tenggara.

3. METODE PENELITIAN

Data Dan Sumber Data

Objek dan lokasi penelitian adalah permasalahan yang diteliti. Dalam objek yang menjadi variabel penelitian ini adalah PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA, Belanja Modal lokasi

penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana suatu penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Kabupaten Aceh Tenggara.

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kuantitatif dengan memakaiteori-teori dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data time series (runtun waktu) yakni data PAD, DAU, DAK, DBH, SILPA dan Belanja Modalyang merupakan data sekunder selama periode 2008–2017. Data diperoleh dari BPKD Aceh Tenggara. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mendokumentasikan atau mengarsipkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Defenisi Operasional Variabel

Variabel Terikat (Dependen)

Variabel *dependen* juga sering dipakai sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Variabel terikat ialah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena keberadaan variabel bebas (Sugiyono, 2013).

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah satuan Rupiah (Rp) dalam periode 2008–2017. Data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tenggara.

Variabel Bebas (Independen)

Variabel *independen* juga sering di sebut variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Variabel independenialahvariabel yang mempengaruhi dan yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013).

Variabel *independen* dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPAP ada periode yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah tahun 2008–2017.

Metode Analisis Data

Model dasar persamaan estimasi OLS (Ordinary Least Square) akan dikembangkan menjadi model dinamis dan menaksirkan variabel dependen berdasarkan regresi, dengan rumus:

$$BM = a + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DHB + \beta_5 SiLPA + e$$

Dimana:

a	= Konstanta
BM	= Belanja Modal
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DBH	= Dana Bagi Hasil

SiLPA = Sisa Lebih Pembiayaa Anggaran

B = Koefisien Regresi (Parameter)

Et = *Error term*

VAR adalah mencari adanya hubungan timbal balik atau uji kausalitas antar variabel endogen/dependen (terikat) didalam model VAR. Hubungan timbal balik ini dapat diuji menggunakan uji kausalitas Granger Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Widarjono, 2007). Pendekatan dengan menggunakan analisis VAR mencakup tiga alat analisis utama yaitu *granger causality test*, *impulse response funcion* (IRF) dan *forecast error decomposition of variance* (FEDV).

Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas / uji akar-akar unit (*Unit Root Test*) dilakukan untuk menentukan stasioner tidaknya sebuah variabel. Data dikatakan stasioner apabila data tersebut mendekati rata-ratanya, dan apabila data yang diamati dalam uji derajat integrasi (*Integration Test*) sampai memperoleh data yang stasioner. Bentuk persamaan uji stasioneritas;dengan analisisPP (*phillip-perron*).

Apabila dalam pengujian ini menunjukkan nilai PP statistik lebih besar dari pada *Mackinnon Critical Value* maka data tersebut stasioner, dan sebaiknya apabila nila PP statistik lebih kecil dari pada *Mackinnon Critical Value* maka data tersebut tidak stasioner.

Penentuan Lag Optimum

Penentuan jumlah *lag* dalam model VAR ditentukan pada kriteria informasi yang disarankan oleh nilai terkecil dari *Final Prediction Error*(FPE), *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Criterion*(SC), dan *Hannan-Quinn* (HQ). Program Eviews telah memberi petunjuk tanda bintang bagi *lag* yang ditetapkan sebagai *lag optimum*.

Pengujian Stabilitas VAR

Pengujian stabilitas VAR dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh, karena jika hasil estimasi VAR yang dikombinasikan dengan model koreksi kesalahan tidak stabil, maka *impulse response function* (IRF) dan *forecasting error variance decomposition* (FEVD) menjadi tidak valid.. Suatu sistem VAR dikatakan stabil jika seluruh *roots*-nya memiliki modulus lebih kecil dari 1.

Uji Kausalitas Granger

Metode yang dipakai untuk menganalisis hubungan kausalitas antar variabel yang diamati adalah dengan uji kausalitas Granger. Dalam penelitian ini hubungan kausalitas dilihat adalah PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Aceh Tenggara. Secara umum suatu persamaan granger dapat disebutkan sebagai berikut:

1. *Unidirectional causality*
2. *Feedback/bilateral causality*
3. *Independence*

Pengambilan keputusan dalam uji kausalitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai t-statistik hasil estimasi dengan nilai t-tabel atau dengan melihat nilai probabilitas F-statistik. Jika nilai t-statistik hasil estimasi lebih besar dari nilai t-tabel atau nilai probabilitas F-statistik $< \alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh antara dua variabel yang diuji, dan begitu juga sebaliknya.

Estimasi Vector Autoregression (VAR)

Dalam estimasi VAR, untuk mengetahui apakah variabel Y mempengaruhi X dan demikian pula sebaliknya, dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai t-statistik hasil estimasi dengan t-tabel. Jika nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka dapat dikatakan bahwa variabel Y mempengaruhi X. Adapun persamaan VAR dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM_t = \alpha + \sum_{i=1} \beta_1 PAD_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_2 DAU_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_3 DAK_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_4 DBH_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_5 SiLPA_{t-i} + \varepsilon_{t1}$$

$$BM_t = \alpha + \sum_{i=1} \beta_1 BM_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_2 PAD_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_3 DAU_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_4 DAK_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_5 DBH_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_6 SiLPA_{t-i} + \varepsilon_{t1}$$

$$PAD_t = \alpha + \sum_{i=1} \beta_1 PAD_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_2 BM_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_3 DAU_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_4 DAK_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_5 DBH_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_6 SiLPA_{t-i} + \varepsilon_{t1}$$

$$DAU_t = \alpha + \sum_{i=1} \beta_1 DAU_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_2 BM_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_3 PAD_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_4 DAK_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_5 DBH_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_6 SiLPA_{t-i} + \varepsilon_{t1}$$

$$DAK_t = \alpha + \sum_{i=1} \beta_1 DAK_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_2 BM_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_3 PAD_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_4 DAU_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_5 DBH_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_6 SiLPA_{t-i} + \varepsilon_{t1}$$

$$DBH_t = \alpha + \sum_{i=1} \beta_1 DBH_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_2 BM_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_3 PAD_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_4 DAU_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_5 DAK_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_6 SiLPA_{t-i} + \varepsilon_{t1}$$

$$SiLPA_t = \alpha + \sum_{i=1} \beta_1 SiLPA_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_2 BM_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_3 PAD_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_4 DAU_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_5 DAK_{t-i} + \sum_{i=1} \beta_6 DBH_{t-i} + \varepsilon_{t1}$$

Keterangan :

- BM : Belanja Modal
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DAK : Dana Alokasi Khusus
- DBH : Dana Bagi Hasil
- SilPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- ε_{t1} : Faktor Gangguan
- β_1 : Konstanta

Analisa Impuls Response Function (IRF)

VAR ialah metode yang dipakai untuk menentukan sendiri struktur dinamisnya dari suatu

model. Setelah melakukan uji VAR, diperlukan adanya metode yang dapat mencirikan struktur dinamis dari sistem variabel dalam model yang diamati yang dicerminkan oleh variabel inovasi (*innovation variabel*). Salah satu bentuk dari hasil uji ini adalah IRF.

Analisis Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)

FEVD dapat memberikan informasi mengenai variabel yang relatif lebih penting dalam VAR. Model ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana perubahan dalam suatu variabel makro, yang ditunjukkan oleh perubahan *variance error* yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya.

Dekomposisi varians merinci varians dari *error* peramalan (*forecast*) menjadi komponen-komponen yang dapat dihubungkan dengan setiap variabel endogen dalam model. Dengan menghitung persentase *squared prediction error* ketahap ke depan dari sebuah variabel akibat inovasi dalam variabel-variabel lain dapat dilihat seberapa besar *error* peramalan yang diakibatkan oleh variabel itu sendiri terhadap variabel-variabel lainnya.

Uji ini dilakukan untuk memberi informasi mengenai bagaimana hubungan dinamis antara variabel yang dianalisis. Selain itu, FEVD ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh acak guncangan (*random shock*) dari variabel tertentu terhadap variabel endogen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian terkait apa yang telah dilakukan, diamati, dipaparkan dan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Uraian pada bab ini telah dikaitkan dengan hasil kajian teori dan penelitian-penelitian yang relevan terhadap penelitian ini. Untuk penelitian ini telah disusun dengan implikasi dari temuan yang dilakukan.

Uji stasioneritas

Hasil uji stasioneritas dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Uji Unit Root Test Model Phillips-Perrons (PP)

Variabel	Unit Root	PP Test statistic	Critical value 5%	Prob PP	keterangan
BM	Level	-1.778152	-3.529758	0.6960	Tidak
	First Diff	-6.337484	-3.533083	0.0000	Stasioner
	Second Diff	-19.86041	-3.536601	0.0000	Stasioner
PAD	Level	-2.304905	-3.529758	0.4215	Tidak
	First Diff	-6.384166	-3.533083	0.0000	Stasioner

	Second Diff	-31.03130	-3.536601	0.0000	Stasioner
DAU	Level	-2.639144	-3.529758	0.2662	Tidak
	First Diff	-7.876013	-3.533083	0.0000	Stasioner
	Second Diff	-24.33213	-3.536601	0.0000	Stasioner
DAK	Level	-2.055357	-3.529758	0.5536	Tidak
	First Diff	-5.972837	-3.533083	0.0001	Stasioner
	Second Diff	-36.39609	-3.536601	0.0000	Stasioner
DBH	Level	-2.834887	-3.529758	0.1941	Tidak
	First Diff	-6.294368	-3.533083	0.0000	Stasioner
	Second Diff	-19.34866	-3.536601	0.0000	Stasioner
SiLPA	Level	-2.392970	-3.529758	0.3773	Tidak
	First Diff	-6.232956	-3.533083	0.0000	Stasioner
	Second Diff	-22.40645	-3.536601	0.0000	Stasioner

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal, PAD, DAU, DAK, DBH dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) stasioner pada pada First Difference I(1) dan Second Difference II(2) dengan menggunakan regresi konstan (in tercept) pada tingkat signifikan 1%,5%, dan 10%, karena nilai phillips-perron test statistic lebih besar dari critical value, dan probabilitas signifikan di 5%. Kemudian dapat disimpulkan bahwa untuk stasioner pada level yang sama data dalam penelitian stasioner pada First Different.

Penentuan Lag Optimum

Penentuan jumlah lag dalam model VAR ditentukan pada kriteria informasi yang direkomendasikan oleh nilai terkecil dari *Final Prediction Error* (FPE), *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Criterion*(SC), dan *Hannan-Quinn* (HQ). Program Eviews telah memberi petunjuk tanda bintang bagi lag yang ditetapkan sebagai lag optimum.

Tabel 3
Hasil Pengujian Lag Optimum

lag	logL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-5568.193	NA	2.9e+123	301.3077	301.5690	301.3998
1	-5403.747	266.6696*	2.9e+120*	294.3647*	296.1933*	295.0094*
2	-5395.495	10.70525	1.5e+121	295.8646	299.2606	297.0618
3	-5376.6	18.32258	6.1e+121	296.7926	301.7560	298.5424

63					
----	--	--	--	--	--

Sumber : Hasil pengolahan Data, 2019

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa Nilai lag optimum dalam penelitian terdapat pada lag satu. Dimana pada lag ini terhimpun nilai terendah dari LR (*sequential modified LR test statistic* (each test at 5% level), FPE (*Final prediction error*), nilai AIC (*Akaike information criterion*), SC (*Schwarz information criterion*) dan nilai HQ (*Hannan-Quinn information criterion*) terletak pada Lag 1. Namun jika diakumulasikan maka jumlah bintang terbanyak terdapat pada Lag 1 yang kemudian dapat disimpulkan bahwa Lag Optimum berada pada Lag 1.

Granger Causality

Uji Granger Causality dimaksudkan untuk mengetahui apakah antar variabel terjadi hubungan timbal balik atau tidak. Kemudian sebagai acuan penetapan variabel terikat dalam penelitian, namun tetap pada rasionalitas berfikir. Berikut adalah hasil Uji Granger Causality pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Granger Causality Test

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
DPAD does not Granger Cause DBM	38	5.07396	0.0307
DBM does not Granger Cause DPAD		0.63163	0.4321
DDAU does not Granger Cause DBM	38	3.02090	0.0910
DBM does not Granger Cause DDAU		0.33878	0.5643
DDAK does not Granger Cause DBM	38	1.68773	0.2024
DBM does not Granger Cause DDAK		6.09974	0.0185
DDHB does not Granger Cause DBM	38	0.69640	0.4097
DBM does not Granger Cause DDHB		2.46866	0.1251
DSILPA does not Granger Cause DBM	38	2.48762	0.1237
DBM does not Granger Cause DSILPA		2.14913	0.1516
DDAU does not Granger Cause DPAD	38	4.05558	0.0518
DPAD does not Granger Cause DDAU		0.15477	0.6964
DDAK does not Granger Cause DPAD	38	0.53641	0.4688
DPAD does not Granger Cause DDAK		5.14572	0.0296
DDHB does not Granger Cause DBM	38	0.03996	0.8427

DPAD

DPAD does not Granger Cause DDHB	6.23413	0.0174
<hr/>		
DSILPA does not Granger Cause DPAD	38	2.92195
DPAD does not Granger Cause DSILPA	2.89212	0.0979
<hr/>		
DDAK does not Granger Cause DDAU	38	1.02847
DDAU does not Granger Cause DDAK	2.46627	0.1253
<hr/>		
DDHB does not Granger Cause DDAU	38	0.00626
DDAU does not Granger Cause DDHB	4.92720	0.0330
<hr/>		
DSILPA does not Granger Cause DDAU	38	0.06766
DDAU does not Granger Cause DSILPA	5.07307	0.0307
<hr/>		
DDHB does not Granger Cause DDAK	38	2.71663
DDAK does not Granger Cause DDHB	0.51537	0.4776
<hr/>		
DSILPA does not Granger Cause DDAK	38	1.08698
DDAK does not Granger Cause DSILPA	3.84786	0.0578
<hr/>		
DSILPA does not Granger Cause DDHB	38	1.65940
DDHB does not Granger Cause DSILPA	2.71077	0.1086

Sumber: hasil pengolahan data, 2019

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki hubungan searah terhadap Belanja Modal yaitu sebesar $0.0307 < 0,05$. Sedangkan Belanja Modal tidak memiliki hubungan terhadap PAD yang dibuktikan oleh nilai probabilitas granger lebih besar dari tingkat kepercayaan 0,05 (5%) yaitu sebesar $0.4321 > 0,05$. variabel DAU tidak memiliki hubungan terhadap Belanja Modal begitupun sebaliknya, belanja modal tidak memiliki hubungan terhadap DAU. Variabel DAK tidak memiliki hubungan terhadap variabel Belanja Modal, sedangkan Belanja Modal memiliki hubungan searah terhadap DAK dapat dibuktikan dengan melihat nilai probabilitas granger dengan tingkat kepercayaan 0,05%, yaitu $0.2024 > 0,05\%$ dan $0.0185 < 0,05\%$. Hubungan dikatakan terjadi apabila tiap-tiap variabel memiliki hubungan dua(2) arah signifikan pada level 5% atau (probabilitas $< 0,05\%$)

Hasil Estimasi Vector Autoregresion (VAR)

Estimasi Vector Autoregression (VAR) dilakukan untuk menentukan model yang baik serta dalam rangkaian menentukan sebuah proyeksi pada kondisi perekonomian, dimana hasil yang diambil didasarkan pada tingkat signifikansi pada toleransi kesalahan $\alpha = 0.05$ yakni dengan

membandingkan t hitung dengan t table (2.03224). Berikut adalah hasil estimasi pengujian Vector Autoregression (VAR).

Tabel 5
Uji Vector Autoregression

	DBM	DPAD	DDAU	DDAK	DDHB	DSILPA
DBM						
(-1)	0.801283 (0.23462) 3.41518	0.015504 (0.03694)	0.156120 (0.13568)	0.160699 (0.28423)	-0.008337 (0.02031)	-0.049878 (0.09155)
DPA						
D(-1)	1.619202 (1.45789) 1.11065	0.674245 (0.22953)	-0.980940 (0.84308)	1.335521 (1.76615)	-0.054363 (0.12619)	-0.110702 (0.56885)
DDA						
U(-1)	-0.144153 (0.29217) -0.49339	0.062063 (0.04600)	1.209320 (0.16896)	-0.153103 (0.35394)	-0.007424 (0.02529)	0.085405 (0.11400)
DDA						
K(-1)	0.009691 (0.20161) 0.04807	-0.022112 (0.03174)	-0.188937 (0.11659)	0.645606 (0.24424)	0.001228 (0.01745)	0.060201 (0.07867)
DDH						
B(-1)	0.030400 (1.84590) 0.01647	0.044241 (0.29062)	0.085444 (1.06745)	-0.097959 (2.23619)	0.593641 (0.15978)	0.047176 (0.72025)
DSIL						
PA(-1)	0.293960 (0.44498) 0.66062	0.015321 (0.07006)	-0.326145 (0.25732)	-0.090346 (0.53907)	-0.009185 (0.03852)	0.764112 (0.17363)
C	4.32E+10 (1.3E+11) [0.33125]	-1.71E+10 (2.1E+10)	-5.22E+10 (7.5E+10)	4.05E+10 (1.6E+11)	1.72E+10 (1.1E+10)	-2.30E+10 (5.1E+10)

Sumber : Hasil Pengolahan, 2019

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa dengan lag optimum di lag 1 dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal itu sendiri, yang dibuktikan dengan nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel yaitu $3.41518 > 2.03224$. variabel PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, yang dibuktikan dengan nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel yaitu $1.11065 < 2.03224$. Kemudian variabel DAU tidak berpengaruh dan tidak signifikan yang dibuktikan dengan nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel yaitu $-0.49339 < 2.03224$. Variabel DAK tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal yang dibuktikan dengan nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel yaitu $0.04807 < 2.03224$ selama periode penelitian, variabel DBH tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal yang dibuktikan dengan nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel yaitu $0.01647 < 2.03224$ selama periode penelitian. Sedangkan variabel Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal yang dibuktikan dengan nilai t-statistik

lebih kecil dari t-tabel yaitu $0.66062 < 2.03224$ selama periode penelitian.

Uji Stabilitas Vector Autoregression (VAR)

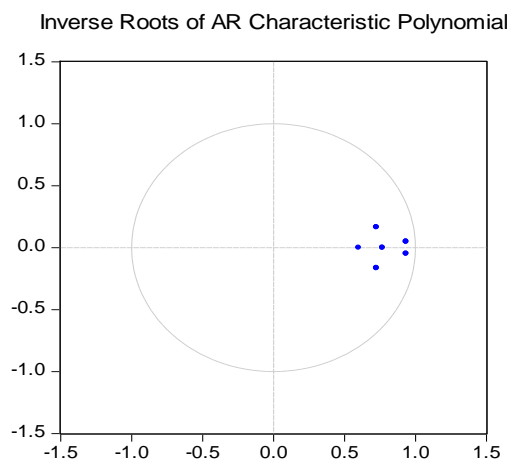
Uji Stabilitas VAR dilakukan untuk melihat apakah pengujian yang telah dilakukan stabil atau tidak. Berikut adalah hasil uji stabilitas Var yang telah dilakukan pada tabel 6.

Tabel 6
Uji Stabilitas Vector Autoregression

Root	Modulus
0.934535 - 0.048721i	0.935804
0.934535 + 0.048721i	0.935804
0.767669	0.767669
0.726011 - 0.164696i	0.744457
0.726011 + 0.164696i	0.744457
0.599446	0.599446

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan hasil pengujian stabilitas *Vector Autoregression* pada tabel 6 menunjukkan bahwa persamaan VAR memiliki nilai modulus kurang dari satu(1) pada lag 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model VAR yang dibentuk sudah stabil pada lag optimum yaitu lag 1. Stabilitas VAR dapat juga kita lihat pada gambar berikut :



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

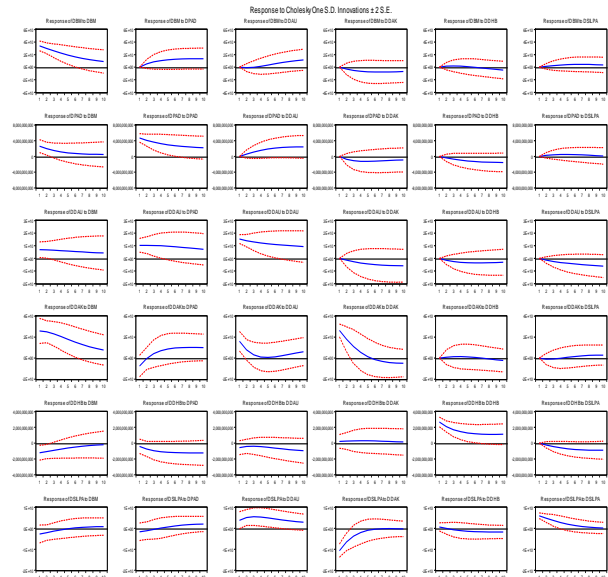
Gambar 2
Stabilitas VAR

Pada gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa titik *invers roots of AR polynomial* semuanya berada pada lingkaran.

Impulse Response

Analisis Impulse Respon dilakukan untuk melacak respon dari variabel endogen dalam sistem VAR karena adanya guncangan (Shock) atau perubahan pada variabel gangguan. Dengan

kata lain untuk melihat berapa lama satu variabel kembali normal setelah terjadi guncangan akibat variabel lain. Berikut hasil Impulse Response.



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

Gambar 3
Hasil Impulse Response

Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa pada tahun pertama Belanja Modal mengalami kenaikan dan pada tahun ke2 terjadi guncangan terhadap variabel itu sendiri sehingga Belanja Modal mengalami penurunan yang signifikan dan pada tahun ke10 Belanja Modal baru kembali stabil.

Variabel PAD pada tahun pertama mengalami peningkatan yang signifikan dan pada tahun ke2 PAD mengalami guncangan atau shock terhadap Belanja Modal. Artinya PAD mencapai titik kesimbangan atau equilibriumnya yaitu pada tahun ke7. Dimana membutuhkan waktu 6 tahun setelah terjadi shock untuk kembali stabil.

Variabel DAU pada tahun pertama mengalami peningkatan yang signifikan dan pada tahun 2 Dana Alokasi Umum mengalami guncangan sampai pada tahun ke9 terhadap belanja modal. sedangkan pada tahun ke sepuluh 10 dana alokasi umum kembali ke titik stabil. Artinya setelah terjadinya shock butuh waktu 8 tahun untuk stabil.

Variabel DAK pada tahun pertama mengalami peningkatan dan pada tahun ke tiga baru mengalami shock atau guncangan terhadap belanja modal. Sedangkan pada tahun ke delapan DAK mulai mencapai titik keseimbangan. Artinya DAK butuh waktu enam tahun untuk kembali stabil setelah terjadi nya shock terhadap belanja modal.

Variabel DBH pada awal periode mengalami fluktuasi negative yang menurun dan

pada tahun ke2 Dana Bagi Hasil mengalami shock dan guncangan terhadap belanja modal. Sedangkan pada tahun ke10 Dana Bagi Hasil kembali mencapai titik keseimbangan. Artinya setelah terjadinya shock atau guncangan butuh waktu 9 tahun untuk stabil.

Varibael SILPA pada awal periode mengalami fluktuasi negative yang menurun sampai pada tahun ke5 dan mencapai titik keseimbangan pada tahun 6. Artinya butuh waktu 4 tahun SILPA kembali stabil setelah ada guncangan.

Variance Decomposition Analysis

Analisis *Variance Decomposition* menggambarkan relatif pentingnya setiap variabel di dalam sistem VAR karena adanya shock. Untuk melihat hasil pengujian variance decomposition dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Variance Decomposition Belanja Modal

Periode	S.E.	DBM	DPAD	DDAU	DDAK	DDHB	DSILPA
1	3.43E+10	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	4.62E+10	98.02078	1.389568	0.043850	0.399170	0.007275	0.139360
3	5.43E+10	94.68839	3.639549	0.033528	1.176430	0.030853	0.431249
4	6.03E+10	90.81374	6.104804	0.089076	2.134494	0.069229	0.788656
5	6.51E+10	86.81595	8.448487	0.391048	3.113832	0.114543	1.116137
6	6.92E+10	82.90057	10.51695	1.064107	4.015607	0.157586	1.345178
7	7.27E+10	79.16600	12.25900	2.138599	4.795495	0.191333	1.449574
8	7.58E+10	75.65787	13.67786	3.561088	5.447255	0.212397	1.443531
9	7.87E+10	72.39433	14.80296	5.226661	5.986065	0.220856	1.369134
10	8.14E+10	69.37764	15.67352	7.013241	6.435868	0.219206	1.280519

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan hasil analisis *variance decomposition* pada tabel 7 menunjukkan bahwa pada awalnya belanja modal masih sangat dipengaruhi oleh belanja modal itu sendiri yaitu sebesar 100% dimana PAD, DAU, DAK, DBH, dan SILPA belum memberikan pengaruh sama sekali. Namun pada tahun-tahun selanjutnya kontribusi shock PAD, DAU, DAK, dana bagi hasil, dan SILPA mengalami peningkatan hingga tahun ke 10, PAD sebesar 15,67 DAU sebesar 7,01 DAK sebesar 6,43 DBH sebesar 0,21 dan SILPA sebesar 1,28. Hal ini mengikuti penurunan proporsi shock belanja modal terhadap belanja modal itu sendiri namun sampai tahun ke 10 kontribusinya masih relatif besar yaitu 69,37 persen.

Tabel 8
Variance Decomposition Pendapatan Asli Daerah

Periode	S.E.	DBM	DPAD	DDAU	DDAK	DDHB	DSILPA
1	5.41E+09	25.17052	74.82948	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	7.07E+09	23.73020	74.28237	0.815673	1.120985	0.034585	0.016182
3	8.15E+09	22.22756	72.12352	2.767815	2.792479	0.073172	0.015457
4	8.98E+09	20.80690	69.04129	5.595653	4.437850	0.095074	0.023228
5	9.67E+09	19.53586	65.56497	8.865906	5.824651	0.098543	0.110075
6	1.03E+10	18.43529	62.04415	12.16075	6.917382	0.091063	0.351370
7	1.08E+10	17.50012	58.67889	15.17652	7.763951	0.081958	0.798551
8	1.14E+10	16.71243	55.56515	17.74301	8.432117	0.078544	1.468742
9	1.18E+10	16.04921	52.73543	19.80014	8.982260	0.084993	2.347962
10	1.23E+10	15.48707	50.18799	21.36198	9.459579	0.102646	3.400735

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan hasil analisis *variance decomposition* PAD pada tabel 8 menunjukkan bahwa pada awalnya PAD masih sangat dipengaruhi oleh PAD itu sebesar 74,8 belanja modal sebesar 25,17. Dimana dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran belum memberikan pengaruh sama sekali. Namun pada tahun-tahun selanjutnya kontribusi shock belanja modal, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran mengalami 10 sumbangan shock belanja modal sebesar 15,48 DAU sebesar 21,36 DAK sebesar 9,45 DBH sebesar 0,10 dan SILPA sebesar 3,40. Hal ini mengikuti penurunan proporsi shock PAD namun sampai tahun ke 10 kontribusinya masih relatif besarnya itu 50,18 persen.

Tabel 9
Variance Decomposition Dana Alokasi Umum

Periode	S.E.	DBM	DPAD	DDAU	DDAK	DDHB	DSILPA
1	1.99E+10	12.86455	25.91650	61.21894	0.000000	0.000000	0.000000
2	2.74E+10	13.51387	26.11376	59.58083	0.302562	0.002159	0.486818
3	3.30E+10	13.90108	25.97581	57.71908	0.930368	0.011572	1.462084
4	3.76E+10	14.07266	25.58445	55.75279	1.787226	0.031243	2.771626
5	4.15E+10	14.07830	25.01663	53.77077	2.782670	0.061777	4.289854
6	4.50E+10	13.96358	24.33757	51.83371	3.842297	0.102147	5.920695
7	4.81E+10	13.76666	23.59858	49.97958	4.910599	0.150525	7.594059
8	5.10E+10	13.51748	22.83780	48.22967	5.949504	0.204860	9.260685
9	5.36E+10	13.23855	22.08219	46.59390	6.935094	0.263200	10.88707
10	5.60E+10	12.94615	21.34995	45.07487	7.854023	0.323838	12.45118

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan hasil analisis *variance decomposition* DDU pada tabel 9 menunjukkan pada awalnya dana alokasi umum masih sangat

dipengaruhi oleh DAU sebesar 61,21 belanja modal sebesar 12,86. Dimana PAD memberikan pengaruh sebesar 25,91. Namun pada tahun-tahun selanjutnya kontribusi shock BM, PAD, DAU, DAK, dan SILPA terus mengalami peningkatan. Hingga tahun ke 10 sumbangan shock belanja modal sebesar 12,94 PAD sebesar 21,34 DAK 7,85 DBH sebesar 0,32 dan SILPA. Hal ini mengikuti penurunan proporsi shock dana alokasi umum itu sendiri namun sampai tahun ke 10 kontribusinya relatif sebesar 45,07 persen.

Tabel 10

Variance Decomposition Dana Alokasi Khusus

Peri od	S.E.	DBM	DPAD	DDAU	DDAK	DDHB	DSILPA
1	4.16E+10	39.59561	3.477634	15.33675	41.59000	0.000000	0.000000
2	5.26E+10	47.92539	2.174757	11.81258	38.07262	0.004472	0.010173
3	5.89E+10	53.89257	2.383948	9.718508	33.99199	0.004774	0.008204
4	6.31E+10	57.60181	3.522325	8.484499	30.36387	0.004659	0.022840
5	6.63E+10	59.54788	5.079847	7.703339	27.57975	0.010154	0.079032
6	6.88E+10	60.27349	6.716160	7.192271	25.62246	0.023272	0.172350
7	7.09E+10	60.21468	8.244609	6.916019	24.30622	0.041847	0.276627
8	7.27E+10	59.67553	9.582922	6.892603	23.42471	0.061763	0.362474
9	7.43E+10	58.85387	10.70935	7.132743	22.81304	0.079135	0.411855
10	7.58E+10	57.87481	11.63309	7.616873	22.35985	0.091543	0.423831

Sumber : Hasil pengolahan data, 2019

Berdasarkan hasil analisis *variance decomposition* DAK pada tabel 10 menunjukkan bahwa pada awalnya DAK masih sangat dipengaruhi DAK itu sendiri sebesar 41,59 belanja modal sebesar 39,59 PAD sebesar 3,47 DAU sebesar 15,33. Namun pada tahun-tahun selanjutnya kontribusi shock BM, PAD, DAU terus mengalami fluktuatif. Hingga tahun ke 10 sumbangan shock belanja modal sebesar 57,87 PAD sebesar 11,63 DAU sebesar 7,61 DBH sebesar 0,09 dan SILPA 0,42. hal ini mengikuti peningkatan proporsi shock DAK itu sendiri dan sampai tahun ke 10 kontribusinya relatif besar yaitu sebesar 22,39 persen.

Tabel 11

Variance Decomposition Dana Bagi Hasil

Peri od	S.E.	DBM	DPAD	DDAU	DDAK	DDHB	DSILPA
1	2.97E+09	18.75871	0.621355	3.345933	0.634722	76.63928	0.000000
2	3.62E+09	23.50809	2.031089	3.822983	0.997024	69.61861	0.022201
3	3.96E+09	27.02237	3.894316	4.424720	1.491126	63.10930	0.058167
4	4.21E+09	29.26871	5.870913	5.191447	2.079938	57.50275	0.086242

5	4.41E+09	30.49455	7.723214	6.148601	2.713407	52.82559	0.094633
6	4.58E+09	31.00002	9.333798	7.288182	3.348337	48.94096	0.088706
7	4.75E+09	31.03447	10.66860	8.568932	3.956782	45.68265	0.088569
8	4.90E+09	30.77633	11.73824	9.928630	4.525547	42.90923	0.122028
9	5.04E+09	30.34461	12.57255	11.29925	5.052022	40.51450	0.217079
10	5.18E+09	29.81590	13.20671	12.61916	5.539702	38.42231	0.396223

Sumber : Hasil pengolahan Data, 2019

Berdasarkan hasil analisis *variance decomposition* DBH pada tabel 11 menunjukkan bahwa pada awalnya DBH masih sangat dipengaruhi oleh DBH sebesar 76.63, belanja modal sebesar 18.75, PAD sebesar 0.62, dana alokasi umum sebesar 3.34, DAK memberikan pengaruh sebesar 0.63. Namun pada tahun-tahun selanjutnya kontribusi shock belanja modal, PAD, DAU, DAK, dan SILPA yang terus mengalami fluktuatif. Hingga tahun ke 10 sumbangan shock belanja modal sebesar 29.81, pendapatan asli daerah sebesar 13.20, DAU sebesar 12.61, DAK sebesar 5.53, dan SILPA sebesar 0.38. Hal ini mengikuti peningkatan proporsi shock DBH itu sendiri dan tahun ke 10 kontribusinya relatif besar yaitu sebesar 38.42 persen.

Tabel 12

Variance Decomposition SiLPA

Peri od	S.E.	DBM	DPAD	DDAU	DDAK	DDHB	DSILPA
1	1.34E+10	4.174037	2.176339	8.229668	65.56359	0.641139	19.21523
2	1.67E+10	4.095438	2.369184	15.06810	58.14014	0.731422	19.59571
3	1.84E+10	3.781647	2.344961	21.81029	52.28072	0.757521	19.02486
4	1.94E+10	3.441059	2.207134	27.55346	48.03242	0.742875	18.02306
5	2.02E+10	3.210076	2.060735	31.97851	45.04865	0.711090	16.99095
6	2.07E+10	3.138972	1.975854	35.13492	42.91839	0.678293	16.15358
7	2.11E+10	3.216039	1.981211	37.23507	41.32176	0.652650	15.59327
8	2.14E+10	3.398936	2.073647	38.52745	40.05861	0.636694	15.30467
9	2.17E+10	3.638918	2.232023	39.23690	39.02124	0.629859	15.24106
10	2.20E+10	3.894697	2.429298	39.54441	38.15665	0.630328	15.34462

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan hasil *variance decomposition* SiLPA pada tabel 12 menunjukkan bahwa pada awalnya SiLPA masih sangat dipengaruhi SiLPA 19,21 belanja modal sebesar 4,17 PAD sebesar 2,17 DAU sebesar 8,22 DAK sebesar 65,56 DBH memberikan pengaruh sebesar 0.64. Namun pada tahun-tahun selanjutnya kontribusi shock belanja modal, PAD, DAU, DAK. DBH terus mengalami fluktuatif. Hingga tahun ke 10 sumbangan shock belanja modal sebesar 3,89 PAD sebesar 2,42 DAU sebesar 39,54 DAK sebesar 38,15 dan DBH sebesar 0,63. Hal ini mengikuti penurunan proporsi shock SiLPA itu

sendiri namun sampai tahun ke 10 kontribusinya relatif besar yaitu sebesar 15,34 persen.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode VAR yang telah dilakukan dan dapat disimpulkan bahwa PAD tidak memiliki korelasi positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, yang dibuktikan dengan nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel yaitu $1.11065 < 2.03224$. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian menggunakan metode penelitian regresi linier berganda dari Mawarni dkk dalam (Belanja, Di, Kota, & Tahun, 2018), yang menyatakan bahwa Dari hasil pengujian diperoleh PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. sedangkan, Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Andri Widiyanto, dkk yang berjudul Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal,

Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode VAR yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel DAU tidak memiliki korelasi positif dan tidak signifikan yang dibuktikan dengan nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel yaitu $-0.49339 < 2.03224$ artinya jika DAU menurun maka belanja modal akan menurun. Hal ini sesuai dengan penelitian Fitri Megawati Sularno (2013) menggunakan metode regresi linier berganda yang menyatakan bahwa DAU secara statistik tidak memberi pengaruh terhadap belanja modal. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Arif Pumama dalam (Ii & Pustaka, 2014) yang berjudul Pengaruh DAU, PAD, SILPA, Dan Luas Wilayah Terhadap BM Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan SILPA tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Sedangkan PAD dan luas wilayah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. hal ini mengindikasikan bahwa DAU yang diterima daerah tidak dipergunakan dalam pembangunan daerah yang terlihat dalam belanja modal.

Hubungan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode VAR yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Variabel DAK tidak memiliki korelasi dan signifikan terhadap Belanja Modal yang dibuktikan dengan nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel yaitu $0.04807 < 2.03224$ selama periode penelitian, hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian menggunakan metode regresi linier berganda, Nuarisa dalam (Pad & Terhadap, 2013) menjelaskan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Antara DAK dengan belanja modal memiliki hubungan/keterkaitan yang signifikan, berupa semakin tinggi DAK yang diterima daerah maka belanja modal daerah tersebut akan semakin meningkat. Penelitian yang mendukung adalah Penelitian Bobby dalam (Pad & Terhadap, 2013) menemukan bahwa DAK tidak memberi pengaruh terhadap Belanja Modal.

Hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode VAR yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel DBH tidak memiliki korelasi dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal yang dibuktikan dengan nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel yaitu $0.01647 < 2.03224$ selama periode penelitian.. Hal ini sesuai Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sianipar dalam (Dak, Dana, & Hasil, 2013), yaitu DBH tidak memberi pengaruh signifikan bagi belanja modal. Artinya apabila DBH sedikit maka belanja modal akan menurun. Hal ini dapat dikarenakan penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda. hasil penelitian yang tidak mendukung oleh Wandira dalam (Dak et al., 2013) menyebutkan bahwa DBH memberi pengaruh signifikan terhadap BM.

Hubungan SiLPA Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode VAR yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel SiLPA tidak memiliki korelasi dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal yang dibuktikan dengan nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel yaitu $0.66062 < 2.03224$ selama periode penelitian. Penelitian Rita Devi Setiyani dalam (Candra, 2016) menyatakan bahwa SiLPA tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa besarnya SiLPA pada suatu daerah menjadi salah satu faktor dalam menentukan belanja modal pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PAD tidak memiliki hubungan timbale balik terhadap Belanja Modal.
2. DAU tidak memiliki hubungan timbale balik positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
3. DAK tidak memiliki hubungan timbal balik dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal
4. DBH tidak memiliki hubungan timbale balik dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
5. SiLPA tidak memiliki hubungan timbal balik dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan analisis *impulse response* dapat dikatakan bahwa saat terjadi shock pada Belanja Modal bahwa pada tahun pertama Belanja Modal mengalami kenaikan dan pada tahun ke dua (2) terjadi guncangan terhadap variabel itu sendiri sehingga Belanja Modal mengalami penurunan yang signifikan dan pada tahun ke sepuluh (10) Belanja Modal baru kembali stabil.

Berdasarkan analisis *variance decomposition* dapat disimpulkan bahwa kontribusi terbesar diperoleh dari Belanja Modal. Pada tahun pertama kontribusinya sebesar 100 persen, itu terjadi pada variabel Belanja Modal kemudian variabel terkecil terjadi pada variabel DBH sebesar 0,10 persen.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebaiknya anggaran dana PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA tersebut lebih di curahkan kepada belanja modal yang nantinya memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau ke pemakaian jangka panjang.
2. Melihat pengaruh Dana Alokasi Khusus sangat signifikan terhadap belanja modal maka sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan anggaran Dana Alokasi Umum yang di proporsikan ke anggaran belanja modal.
3. Melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang secara langsung bertanda negatif terhadap belanja modal,

sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan proporsi Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti penerimaan pembiayaan pada APBD, maupun variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi.
5. Untuk dapat meningkatkan alokasi belanja daerah, pemerintah daerah harus dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah).
- Belanja, T., Di, M., Kota, K., & Tahun, J. T. (2018). No Title.
- Bulukumba, K. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba, 1, 71–86.
- Candra, E. (2016). Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Dana Perimbangan, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Pada Periode 2012-2014.
- Dak, K., Dana, D. A. N., & Hasil, B. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Terhadap Pengalokasian.
- Dana, P., Umum, A., Khusus, A., & Daerah, P. A. (2013). Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di, 1–13.
- Hafizh, M. S. (2018). Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Luas Wilayah, Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah (Studi Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara).
- Hasil, D. B., Lebih, S., Anggaran, P., Wilayah, L., Belanja, T., Pada, M., ... Umum, D. A. (2014). 1 Universitas Maritim Raja Ali Haji, 1–26.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2014). No Title, 9–32.
- Jawa, D. I. (2014). Accounting Analysis Journal,

- 3(4), 553–562.
- Kabupaten, D., Di, K., & Yogyakarta, P. D. I. (N.D.). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta Saptaningsih Sumarmi *).
- Novianto, R., & Hanafiah, R. (N.D.). Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi, 4(1), 1–22.
- Pad, P., & Terhadap, D. A. K. (2013). Accounting Analysis Journal, 2(1).
- Pelealu, A. M., Dana, P., Khusus, A., Dana, P., Khusus, A., Pendapatan, D. A. N., & Daerah, A. (2012). No Title, 1(4), 1189–1197.
- Pradita, R. R. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, S., Fahlevi, H., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Kuala, U. S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten / Kota Di Wilayah Aceh), 1(1).
- Telaah, J., & Akuntansi, R. (2008). Pengaruh Dau , Dak, Pad, Dan Pdrb Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Indonesia Askam Tuasikal Universitas Pattimura Ambon Akam _ T @ Y Askam Tuasikal, 1(2), 142–154.
- Widarjono, A. (2007). Teori Ekonometrika Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis, Edisi Kedua. In *Yogyakarta: Ekonosia*.